

## Kelas Menengah Mencari Bentuk dan Pengakuan

### Pengantar

Pembicaraan tentang kelas menengah tampaknya masih belum sampai pada suatu kesepakatan akan istilah, definisi, ukuran-ukuran dan makna sebenarnya dari konsep middle class. Ada yang mempergunakan istilah "golongan menengah" dan ada pula yang memakai istilah "kelompok menengah". Pada bidang bisnis sebutan pengusaha kecil, pengusaha menengah dan pengusaha besar lazim dipakai. Karena masyarakat kita agaknya merasa alergi terhadap istilah "kelas", maka sebutan "kelas menengah" pun terasa kurang bergema di masyarakat.

Apakah ada "kelas menengah" di Indonesia selama ini? Menurut Dr. Saporinah Sadli, seorang psikolog dan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, kelas menengah itu ada dalam masyarakat Indonesia, tetapi kriterianya tidak sama dengan konsep Barat, yang membagi-bagi struktur masyarakat berdasarkan tingkat penghasilan. Di sini, penghasilan semu seseorang seringkali tidak dihitung, sehingga siapakah sebenarnya yang dapat dikelompokkan sebagai kelas mene-

ngah, tampak samar-samar dan bentuknya masih mengambang.

Dari sisi yang berbeda, Sutjipto Wirosoardjono, wakil kepala Biro Pusat Statistik (BPS) melihat kelas menengah Indonesia masih berbentuk suatu lapisan tipis. Banyak kelompok orang, meskipun berasal dari golongan berpenghasilan cukup ataupun tokoh-tokoh organisasi masyarakat, tidak dapat dimasukkan ke dalam "kelas menengah" karena tidak memiliki keinginan untuk melakukan perombakan dan perubahan ke arah pembaruan masyarakat. Tetapi ia tidak merasa pesimis. Sebab kendati belum terucapkan secara vokal, pendapat-pendapat dari tokoh lembaga-lembaga swadaya masyarakat sebagai kelas menengah, kini secara batiniyah telah mendapat pengakuan dari lapisan atas.

Dialog Prisma kali ini dengan kedua tokoh tersebut berusaha membuka identitas "kelas menengah" itu lebih gamblang, serta mencari peranan apakah yang dapat dimainkan oleh kelas menengah Indonesia dalam rangka pembaruan dan pembangunan masyarakat.

Redaksi

## Kelas Menengah Masih Tersamar dan Terapung

Ny. Saporinah Sadli, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

Konsep "kelas menengah" berasal dari Barat dan berkaitan dengan masalah sosial-ekonomi. Di sana masyarakat dibagi-bagi berdasarkan tingkat pendapatannya ke dalam tiga kelompok: kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah. Misalnya mereka yang memperoleh pendapatan dalam jumlah ter-

tentu, digolongkan sebagai kelas menengah.

Di sini konsep itu sulit diterapkan begitu saja karena berbagai alasan. Saya ambil contoh pada pejabat pemerintah golongan IV. Tingkat dan jumlah gaji setiap bulan dan tunjangan-tunjangan diatur berdasarkan peraturan kepegawaian yang ada. Kepada me-



SAPARINAH SADLI

reka masih pula diberikan fasilitas-fasilitas tertentu. Bentuk dan macam fasilitas yang diberikan kepada pegawai negeri golongan IV itu berbeda antara satu departemen dengan departemen yang lain. Bagaimana kita dapat menilai fasilitas-fasilitas itu dalam bentuk uang? Lalu apakah hal-hal itu tidak dimasukkan dalam hitungan jumlah seluruh pendapatannya?

Karena pendapatan semu semacam itu tidak pernah dihitung dalam rangka pengelompokan tingkat *income* masyarakat Indonesia, maka konsep "kelas menengah" dari struktur masyarakat Barat tidak cocok. Apalagi kalau konsep itu akan diterapkan untuk melihat lapisan-lapisan di kalangan pegawai negeri.

Kita memang masih samar-samar melihat ada tidaknya kelas menengah dengan kriteria tingkat penghasilan seseorang. Katakanlah, mereka masih seperti massa yang mengambang (*floating mass*). Kalau ditanyakan apakah ada kelas atas di Indonesia, maka dengan cepat kita mengatakan kelompok elit itu ada. Begitu pula bila ditanyakan apakah ada kelas bawah di Indonesia, lalu kita segera menjawabnya bahwa orang miskin di sini masih begitu banyak. Andaikata memang telah disepakati adanya kelas atas dan kelas bawah, maka di antara kedua kelas itu pasti-

lah ada kelas menengahnya.

Nah, sekarang kita memakai istilah yang sama yakni "kelas menengah", tetapi kriterianya berbeda. Bisa saja kita pergunakan kriteria tingkat pendidikan, skala kegiatan usaha atau bisnis, kedudukan atau jabatan, dan lain-lain. Dengan cara ini kita dapat melihat ada tidaknya kelas menengah di Indonesia, meskipun jumlahnya sukar dihitung.

### *Ciri dan Kepribadian*

Sulit untuk dikatakan, bahwa orang-orang yang agresif selalu dapat dikelompokkan sebagai kelas menengah. Dalam kasus di negara kita, justru orang yang ekonominya kuat tampil sebagai kelompok yang berani berbicara, karena mereka tidak merasa takut akan kehilangan apa-apa. Saya berpendapat, seharusnya kelas menengah mempunyai ciri "berani". Mereka berani memperjuangkan sesuatu yang dianggapnya perlu diperjuangkan. Karena mereka termasuk orang yang berpendidikan, mereka juga harus berani mempertahankan harga dirinya. Merasa punya keterampilan tertentu, dia juga berani pindah pekerjaan, kalau merasa yakin dengan keterampilan yang dimilikinya dia lebih dapat berkembang di tempat lain.

Saya kurang setuju dengan pemakaian istilah "agresif", sebab agresivitas biasanya cenderung berkonotasi negatif. Dalam hal ini mungkin lebih tepat dipergunakan istilah "inisiatif". Selain kelas menengah harus berani melakukan sesuatu, diharapkan pula mereka mempunyai inisiatif-inisiatif tertentu, sehingga mereka akan menimbulkan dampak terhadap lingkungannya. Dengan demikian suara mereka tidak akan diabaikan orang. Dalam dunia pendidikan kita misalnya, suara dan pendapat Pak Slamet Iman Santoso atau Pak Sugarda Purbakawaca pastilah didengar karena gemanya lebih nyaring.

Tokoh-tokoh di luar pemerintahan, yang pengaruhnya cukup besar dalam masyarakat kita, biasanya disebut pemuka-pemuka masyarakat. Ada yang skala pengaruhnya tingkat nasional dan ada pula yang taratnya tingkat lokal. Mereka ini lazim dinamakan *informal leader*. Suaranya didengar oleh masyarakat setempat atau kelompok yang lebih luas lagi karena mereka memiliki ke-



terampilan tertentu, berwibawa dan punya kharisma tinggi seperti para kyai di pesantren.

---

### Model instruksi

---

Dalam masyarakat Barat kelas menengah merupakan kelompok potensial dan mempunyai pengaruh besar di lingkungannya. Karena kita mencoba menerapkan konsep itu di sini, diharapkan sekali agar kelompok menengah kita pun dapat memainkan peranannya. Barangkali pengaruh kelas menengah di Indonesia sudah ada sedikit, namun tidak sebesar pengaruh kelas atas yang memiliki kedudukan dan kekuasaan. Di sini umumnya opini datang dari lapisan atas. Dalam banyak hal mereka lebih vokal berbicara dan ternyata masyarakat kita umumnya lebih memperhatikan ucapan seorang pembesar dibandingkan suara bawahannya.

Selain itu, memang terlihat kelas elit lebih suka mempergunakan model perintah atau instruksi dalam menggerakkan masyarakat. Kalau mendengar pidato pejabat-pejabat, termasuk di lingkungan organisasi wanita, seringkali diucapkan kata-kata "saya instruksikan . . ." Istilah ini mengandung suatu harapan agar orang menerima apa-apa yang dikatakannya dan mengerjakan segala tugas yang diinstruksikannya.

Model "instruksi" ini bertemu dengan suatu sikap sebagian masyarakat kita yang tidak dapat bergerak kalau tidak diberi instruksi lebih dulu. Tambahan lagi, banyak kelompok masyarakat kita bersikap menerima apa saja. Mereka berperilaku demikian karena dia ingin selamat. Untuk apa ribut-rihut? Dan upaya mencari selamat ini, jangan dipersempit maksudnya.

---

### Perbaikan Ekonomi

---

Di negara-negara yang menganut garis ekonomi liberal, Amerika Serikat misalnya, kelas menengah diharapkan tumbuh menjadi lebih besar, karena peranannya amat diperlukan untuk mendukung ekonomi negara. Karena mereka memang besar, kelompoknya tampak nyata, dan pendapat-pendapatnya selalu memperoleh perhatian serius dari kelas atas.

Perbaikan ekonomi yang dilancarkan pe-

merintah sekarang mengandung harapan bahwa motivasi orang akan berkembang. Karena ada kegiatan ekonomi yang besar maka lahirlah pengusaha-pengusaha baru. Kesempatan pendidikan pun makin terbuka lebar, sehingga memungkinkan bertambahnya jumlah orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan tertentu. Seniman-seniman juga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, baik di bidang seni lukis, drama, teater, syair dan lain-lain, karena adanya pusat kesenian. Di Jakarta ada Taman Ismail Marzuki—suatu wadah aktivitas seniman—yang dibangun pemerintah berkat dukungan ekonomi yang makin baik.

Pada masa Pelita IV mendatang kita memasuki era industrialisasi. Ada kemungkinan orang-orang yang terampil akan muncul lebih besar, karena memang tahap industrialisasi memerlukan orang-orang terampil dan orang yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi. Tingkat pendapatan kelompok baru ini akan meningkat seiring dengan tingkat keterampilannya. Diharapkan, banyak orang di lapisan bawah terangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka inilah yang akan membentuk kelas menengah baru.

Tetapi apakah pembentukan kelas menengah itu tidak menghadapi hambatan? Saya kira, hambatan itu tetap ada. Misalnya saja tentang feodalisme. Dalam usaha menuju modernisasi, tampaknya akar feodalisme masih belum dapat dicabut, kendati kita telah melewati tiga tahap Pelita. Dari apa-apa yang dikemukakan pemerintah, nampaknya kita membutuhkan enam kali Pelita untuk mengubah situasi feodalisme itu.

Dalam bidang pembangunan ekonomi, kita pun tidak dapat menutup mata tentang adanya sistem koneksi untuk memperoleh *tender* proyek, misalnya. Meskipun seseorang mengajukan *proposal* yang baik, tetap saja dia tidak berhasil memenangkan *tender*, karena tanpa koneksi dengan pihak penguasa. Suasana semacam ini, menurut pendapat saya, menyebabkan banyak pengusaha cenderung lebih menerampilkannya diri mencari koneksi daripada usaha mengembangkan keterampilan profesinya. Mana mungkin mereka akan tampil sebagai wiraswasta yang benar? Dampak negatifnya banyak sekali. Di satu pihak proyek itu akan dibangun

semaunya saja dengan mutu hasil yang kurang memuaskan. Di pihak lain, sistem koneksi amat menghambat tampilnya pengusaha-pengusaha murni yang memiliki keterampilan profesional yang tangguh, untuk maju ke depan, karena kalah bersaing dengan pengusaha "koneksi" itu.

### Menarik ke atas

Di tengah masyarakat Indonesia, tampaknya lapisan kelas bawah masih lebih tebal dibandingkan kelas menengah dan atas. Ini berbeda sekali dengan keadaan masyarakat Belanda misalnya. Meskipun negaranya berbentuk kerajaan, di sana hampir-hampir tidak ada orang yang miskin. Hampir seluruh lapisan bawah sudah ditarik ke atas masuk ke dalam lapisan kelas menengah. Dalam hal ini, kuat tidaknya kelas menengah, memang dapat dilihat pada tingkat kemakmuran negaranya, walaupun sebetulnya kita masih mempertanyakan apakah mereka pun telah merasa bahagia atau tidak dengan status barunya itu.

Kelas menengah Indonesia, yang saya nilai masih bersifat massa mengambang,

secara ekonomis memang lebih kecukupan hidupnya dibandingkan kelas bawah, dan juga sedikit memiliki kekuasaan atau wewenang. Karena bentuknya *floating mass*, mungkin ada lapisan kelas menengah yang telah berada lebih dekat dengan kelas atas, sementara yang dekat dengan lapisan bawah pun masih banyak. Harapan tertuju kepadanya untuk berperan menarik lapisan bawah ke tingkat yang lebih baik.

Kita harus menyadari, bahwa sebetulnya konsep "kelas menengah" ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Sebagai massa potensial, baik di bidang pendidikan, perusahaan maupun di bidang kebudayaan, kelas menengah perlu menampilkan potensinya agar dampak langsung terhadap masyarakat lebih terasa. Dalam hal ini mereka yang masuk organisasi mungkin bisa tampil ke depan sehingga peranannya kelihatan.

Kesadaran akan perlunya kelompok menengah ini berkembang, bukan hanya harus datang dari lingkungan masyarakat, tetapi justru kelompok ataslah yang harus lebih menyadarinya, bila menginginkan negara ini bisa maju.

## Memperkuat dan Mempertebal Lapisan Kelas Menengah

Soetjipto Wirosardjono, Wakil Kepala Biro Pusat Statistik (BPS)

Sebenarnya sebutan kelas menengah lebih mempunyai konotasi sosial-politik daripada ekonomi. Secara teoritis, kelas menengah itu merupakan motor penggerak terhadap perubahan dan pembaruan, baik di lingkungan dekatnya maupun di tingkat nasional. Mereka diharapkan menjadi faktor yang mendinamisir menuju pertumbuhan sosial (*social development*). Karena itu kita akan terkecoh bila melihat kelas menengah semata-mata dengan kacamata ekonomi. Dan kalau kita memakai kedua kriteria itu, maka saya melihat lapisan kelas menengah di Indonesia tipis sekali, sehingga peranannya pun menjadi tidak berarti.

Saya katakan tipis, karena banyak orang yang bila ditinjau menurut kriteria ekonomi

masuk kelas menengah, ternyata komitmennya terhadap perubahan dan pembaruan tidak ada. Mereka yang berpendapatan Rp. 150 ribu rupiah ke atas cenderung untuk mempertahankan *statusquo*. Dalam birokrasi pemerintah, banyak kepala bagian dan kepala biro berusaha mempertahankan kedudukannya, keamanan dirinya dan kepastian naik jabatan, meskipun sebenarnya mereka mampu melakukan perbaikan dan pembaruan lingkungannya. Mereka bukan kelas menengah!

Ada juga kelompok orang, yang dilihat dari segi ekonominya belum tergolong kelas menengah, tetapi ditinjau dari kriteria sosial politik sudah dapat kita golongkan sebagai kelas menengah. Karena jumlahnya sedikit





SOETJIPTO WIROSARDJONO

dan tanpa dukungan ekonomi yang kuat, mereka tidak dapat membentuk suatu lapisan yang tangguh untuk mengambil inisiatif terhadap gagasan-gagasan pembaruan dan perubahan.

### *Kalangan Feodal*

Dibandingkan dengan negara-negara lain, latar belakang kelas menengah di Indonesia unik sekali. Kelas menengah yang berasal dari kalangan pendidik, kaum priyayi dan kepala desa merupakan bagian yang cukup besar. Begitu pula kelas menengah dari lingkungan pesantren cukup berarti. Tetapi kelas menengah dari kalangan berkekuatan ekonomi mampu, relatif kecil jumlahnya. Ini merupakan indikator betapa beragamnya kelas menengah di Indonesia.

Saya berpendapat, kelas menengah itu datang dari kalangan feodal. Karena itu tidak mengherankan bila kecenderungan dan pendekatan feodalistik masih sering terjadi. Akar kultur feodal belum seluruhnya dijebol baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Pemilihan kepemimpinan lembaga-lembaga masyarakat, termasuk partai politik, memperlihatkan kultur feodalistik. Orang ditunjuk sebagai pimpinan hanya karena kekayaan dan jabatan fungsional tertentu.

Organisasi-organisasi itu hanyalah lembaga-lembaga semu, dan pimpinannya pun dapat kita golongkan sebagai kelas menengah "semu".

Sulit dikatakan, kalau mereka adalah pengurus organisasi lantas digolongkan kelas menengah. Kita harus bedakan antara institusi yang semu dan lembaga yang murni. Juga perlu diperhatikan apakah proses seleksi sosial berlangsung wajar atau tidak wajar.

Saya melihat adanya pendekatan feodalistik pada kalangan pengusaha dan pimpinan koperasi. Perjuangannya hanya minta pembagian jatah, kedudukan dalam parlemen atau menuntut keringanan-keringanan tertentu. Situasinya tetap sama seperti masa-masa lalu. Mereka belum mencerminkan sikap *entrepreneurship* dan masih memegang pola feodalistik. Sebagai pengusaha, sebenarnya kewenangan itu bukan diminta melainkan harus direbut.

### *Kesempatan Pengusaha*

Pengusaha-pengusaha kenamaan pada masa Orde Lama seperti Dasaad, TD Pardede, Zainal Abidin dan Markam muncul ketika masih muda. Sekarang pun bermunculan pengusaha-pengusaha muda. Tetapi tidak seluruh pengusaha muda ataupun pengusaha tua itu dapat kita kategorikan sebagai kelas menengah. Harus dilihat dulu, seberapa jauh mereka memakai landasan rasional dalam menghadapi perubahan-perubahan dan siap mengambil resiko. Untuk dapat disebut kelas menengah, mereka harus memiliki—seperti istilah Takdir Alisyahbana—budaya industri (*industrial civilization*).

Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, kedudukan lapisan penguasa dan pengambil keputusan itu sejajar dengan lapisan pengusaha. Di Jepang, *Kaidanren* merupakan partner yang sejajar betul dengan pemerintahnya. Merasa sebagai pembayar pajak utama bagi keuangan negara, kekuatan *lobby* mereka punya pengaruh dalam pengambilan keputusan politik negara. Kepentingan bisnis mereka dapat disalurkan melalui kedutaan-kedutaan Jepang di pelbagai negara. Kekuatan *lobby* pengusaha Yahudi di Amerika sangat menentukan war-

na politik luar negeri dan perdagangan internasional Amerika Serikat. Tetapi di Indonesia kekuatan lapisan pengusaha belum sampai taraf demikian.

Pertumbuhan kelas menengah sebagai kelompok pembaruan, baik dari kalangan wiraswasta, intelektual, politisi dan seniman sangat lamban. Hal itu disebabkan banyak orang dari lapisan kelas menengah runtuh karena tindakan-tindakannya. Mereka melakukan kompromi atau kooptasi dengan kepentingan-kepentingan tertentu sehingga kadar dinamisatornya berkurang. Digunakannya kelas menengah oleh baik kelompok atas maupun kelompok bawah demi tujuan-tujuan tertentu dapat mengaburkan peranannya sebagai faktor dinamika. Karena apa? Seharusnya mereka menjadi sentral gerakan, yang menyeret lapisan bawah ke atas dan melakukan perubahan-perubahan pada lapisan atas supaya *conducive* ke arah pembaruan.

Lingkungan pesantren di Indonesia sesungguhnya dapat melahirkan kelas menengah seperti halnya di Amerika Latin pengaruh kuat gereja Katolik mampu mencetak pastor, intelektual dan seniman yang mempunyai wawasan maju untuk melakukan pembaruan dan perbaikan terhadap masyarakat. Saya ambil contoh Kyai Hasyim Asy'ari. Setelah mengenyam pendidikan di Mekah selama beberapa tahun, begitu pulang ke lingkungan pesantrennya beliau tampil sebagai tokoh pembaru. Sekarang pun para kyai di pesantren, yang memiliki pengetahuan agama kuat, dapat berperan sebagai dinamisator masyarakat, bila diberi tambahan bekal pengetahuan umum lainnya.

Namun dalam situasi pembangunan ekonomi nasional yang sedang giat dilakukan saat ini, tampaknya kelompok pengusaha lebih mempunyai kesempatan untuk tampil sebagai kelas menengah baru di Indonesia. Begitu pula pegawai-pegawai perusahaan swasta nasional, terlebih swasta asing yang kosmopolitan sifatnya, mempunyai kemungkinan lebih besar untuk masuk ke dalam lapisan kelas menengah. Kesadaran akan perubahan dan perbaikan dirinya cukup menonjol, yang tercermin pada tingginya intensitas mereka berpindah pekerjaan dari satu instansi ke instansi lain. Mereka lebih cepat tanggap dalam menjawab tantangan-tantangan hidup.

### Menciptakan iklim

Ada pendapat mengatakan, bahwa dalam rangka pembaruan dan pembangunan sosial politik, langkah pertama yang harus ditempuh adalah dengan memperkuat dan mempertebal lapisan kelas menengah. Saya setuju dengan pendapat ini. Hanya saja timbul pertanyaan: apakah iklim yang ada sekarang cukup *conducive* (memungkinkan) bagi terbentuknya kelas menengah yang makin menebal? Apakah ada dorongan atau masalah justru sebaliknya ada hambatan?

Memang, setiap ada aksi untuk mengubah sesuatu pastilah akan timbul reaksi. Muncul lah tantangan dan hambatan. Tetapi tantangan yang dihadapi itu tidaklah mesti berarti tantangan dari kekuasaan. Dia bisa pula berupa tantangan dari lingkungan yang hendak diubah, apakah itu cara-cara berpikir seseorang atau tata nilai suatu kelompok.

Di kalangan kelas pengambil keputusan, tampaknya telah terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti, seperti kesadaran bahwa mereka pun akan digantikan oleh lapisan-lapisan baru pada masa mendatang. Hal-hal semacam ini pasti akan memberi warna terhadap situasi dan perilaku politik dalam menghadapi terbentuknya kelas menengah.

Penyebaran kesadaran itu perlu diikuti oleh penciptaan iklim di dalam lingkungan masyarakat. Misalnya di kalangan pengusaha sendiri jangan sampai cekcok karena rebutan jatah atau fasilitas tertentu. Pengusaha yang satu menuduh begini, yang lain bilang begitu. *Inner climate* semacam ini tidak bakal menumbuhkan kelas menengah yang mampu mendinamisir perubahan.

Kendati masih kecil, saya melihat ada dinamika kelas menengah. Mereka mulai memiliki akar di masyarakat. Pendapat yang dilontarkan oleh pimpinan-pimpinan lembaga swadaya masyarakat sebagai kelas menengah diakui kebenarannya oleh lapisan atas. Secara batiniah kelas menengah yang tipis ini memperoleh pengakuan (*recognition*). Eksistensinya menjadi lebih kukuh.

Saya tidak pesimis melihat situasi sekarang, sebab biarpun kecil perubahan itu telah terjadi. Bola perbaikan akan terus menggelinding ke arah kemajuan.